



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Hal ini merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan upaya ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang perlu dievaluasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan informasi kinerja instansi pemerintah yang amat strategis dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Penyusunan dokumen ini juga dimaksudkan agar instansi pemerintah yang akuntabel dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Disamping pada saat yang sama menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.



Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen laporan yang dibuat setiap tahun yang bersifat prestasi karena hasil evaluasinya akan disampaikan secara terbuka dan diserahkan secara langsung oleh Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bima ini berdasarkan pada amanat peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Bima.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima tahun 2016 adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016.

1.3. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Majelis adat Sara Dana Mbojo melaksanakan upacara penobatan dan pelantikan H. Ferry Zulkarnain, ST. Sebagai Sultan Bima ke XVI.



Pemerintahan kesultanan Bima berakhir dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penghapusan daerah – daerah swapraja yang sekaligus diikuti pembentukan daerah tingkat II di seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan Undang – undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dibentuk daerah tingkat II Bima yang berkedudukan di Raba.

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan pada tahun 2002 wajah Bima kembali dimekarkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 melalui pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga sekarang daerah yang terhampar di ujung timur pulau sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota Kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Wohu.

1.4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.4.1. Struktur Organisasi

Penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dilakukan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 6) Dinas Perhubungan;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8) Dinas Pariwisata;
 - 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - 14) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 15) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 18) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 22) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan terdiri dari :



- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Sape
 - 2) Kecamatan Bolo
 - 3) Kecamatan Wohu
 - 4) Kecamatan Lambu
 - 5) Kecamatan Monta
 - 6) Kecamatan Wera
 - 7) Kecamatan Madapangga
 - 8) Kecamatan Langgudu
 - 9) Kecamatan Palibelo
 - 10) Kecamatan Belo
 - 11) Kecamatan Ambalawi
 - 12) Kecamatan Donggo
 - 13) Kecamatan Wawo
 - 14) Kecamatan Soromandi
 - 15) Kecamatan Sanggar
 - 16) Kecamatan Parado
 - 17) Kecamatan Tambora
 - 18) Kecamatan Lambitu

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang Dinas dan Badan, Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima masih berlaku menunggu peraturan perundangan yang mengamatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektorat



Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dinas Daerah melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk menguraikan lebih rinci tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bima, Bupati Bima telah menetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Bima, Peraturan Bupati Bima Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima dan Peraturan Bupati



Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima.

1.4.3. Aparat Pemerintah

Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat berjumlah 9.807 orang yang berdasarkan :

1. Golongan I : 108 orang, Golongan II : 2.962 orang, Golongan III : 4.207 orang, Golongan IV : 2.530 orang.
2. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Eselon II : 29 orang, Eselon III : 156 orang, Eselon IV: 7694 orang, Eselon V: 39 orang.
3. Tingkat Pendidikan : SD = 77 orang, SMP = 82 orang, SLTA = 1.678 orang, SMK = 1.578 orang, Diploma I = 166 orang, Diploma II = 1.356 orang, Diploma III = 936 orang, Diploma IV = 38 orang, S1 = 3.776 orang, S2 = 117 orang S3 = 3 orang.
4. Jenis kelamin terdiri dari, laki – laki : 5.787 orang dan perempuan: 4.020 orang.

1.5. Gambaran Umum Daerah

1.5.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha atau 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29.26% dari luas wilayah perairan laut Propinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores.
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.



Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan, 191 desa, 782 Dusun, 1.048 Rukun Warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga (RT), dengan wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tambora dengan luas 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
di Kabupaten Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah			
			Desa	Dusun	RT	RW
1	Monta	22.752	14	45	162	68
2	Parado	26.129	5	18	61	23
3	Madapangga	23.758	11	41	147	44
4	Woha	10.557	15	63	173	80
5	Belo	4.476	9	33	119	50
6	Langgudu	32.294	15	59	168	76
7	Wawo	13.229	9	30	119	48
8	Sape	23.212	18	70	255	117
9	Lambu	40.425	14	40	180	82
10	Wera	46.532	14	82	224	103
11	Ambalawi	18.065	6	38	122	45
12	Donggo	12.383	9	46	125	49
13	Sanggar	47.789	6	22	59	26
14	Tambora	62.782	7	24	54	25
15	Bolo	6.693	14	71	180	73
16	Soromandi	34.166	7	52	134	61
17	Lambitu	6.540	6	15	42	17
18	Palibelo	7.158	12	33	151	61
Kab.Bima		438.940	191	782	2.475	1.048

Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016



Gambar 1.1
Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima



Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011

1.5.2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Wohu. Secara geografis terletak pada:

- Barat – Timur : $118^{\circ} 44'$ – $119^{\circ} 22'$ Bujur Timur
- Utara – Selatan : $08^{\circ} 08'$ – $08^{\circ} 57'$ Lintang Selatan

Gambar 1.2
Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB



Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011



1.5.3. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bima bervariasi dari datar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086 Ha (8,62%).
- Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712 Ha (20,30%).
- Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242 Ha (36,57%).
- Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391 Ha (34,50%).

Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bima merupakan hamparan bergelombang. Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 714 meter di atas permukaan laut (m dpl).

1.5.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bima dapat dijabarkan sebagaimana dalam tabel 2.5. Penggunaan lahan yang terluas adalah hutan seluas 287.461,02 Ha (67,49%) dan persawahan seluas 27.337,80 ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%).

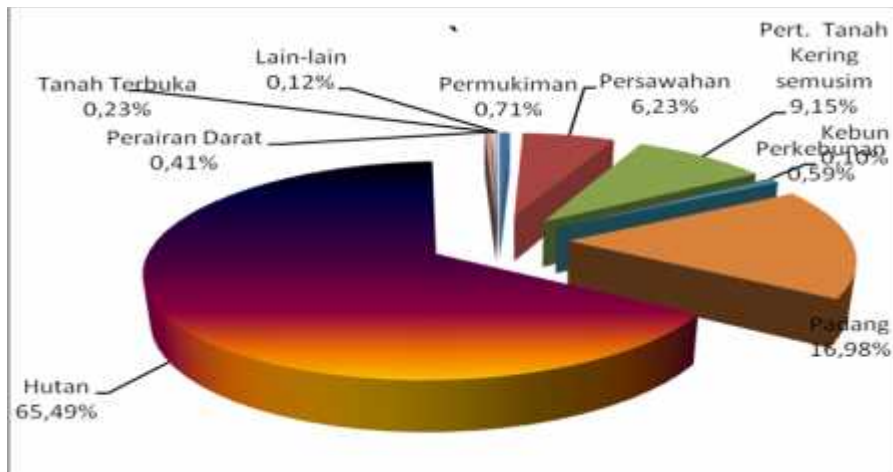
Tabel 1.2
Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Permukiman	3.097,83	0,71
2	Industri	-	-
3	Pertambangan	-	-
4	Persawahan	27.337,80	6,23
5	Pert. Tanah Kering semusim	40.144,78	9,15
6	Kebun	420,70	0,10
7	Perkebunan	2.603,54	0,59
8	Padang	74.517,69	16,98
9	Hutan	287.461,02	65,49
10	Perairan Darat	1.817,67	0,41
11	Tanah Terbuka	998,37	0,23
12	Lain-lain	540,60	0,12
Kab. Bima		438.940,00	

Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015



Grafik 1.1
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima



1.5.5. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil Sensus Penduduk terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik, mencapai 468,682 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,14%. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.

Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2011	220.981	222.682	443.663	1,01
2012	222.883	224.403	447.286	0,82
2013	224.454	226.522	450.976	0,82
2014	230.649	232.770	463.419	2,76
2015	233.288	235.394	468.682	1,14

Sumber: Bima Dalam Angka 2016



1.5.6. Struktur dan Komposisi Penduduk

Pengelompokkan penduduk menurut umur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Penduduk Kabupaten Bima menurut kelompok umur dari hasil sensus penduduk dan keadaan tahun 2016 sebagaimana pada tabel 1.4

Tabel 1.4
Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur

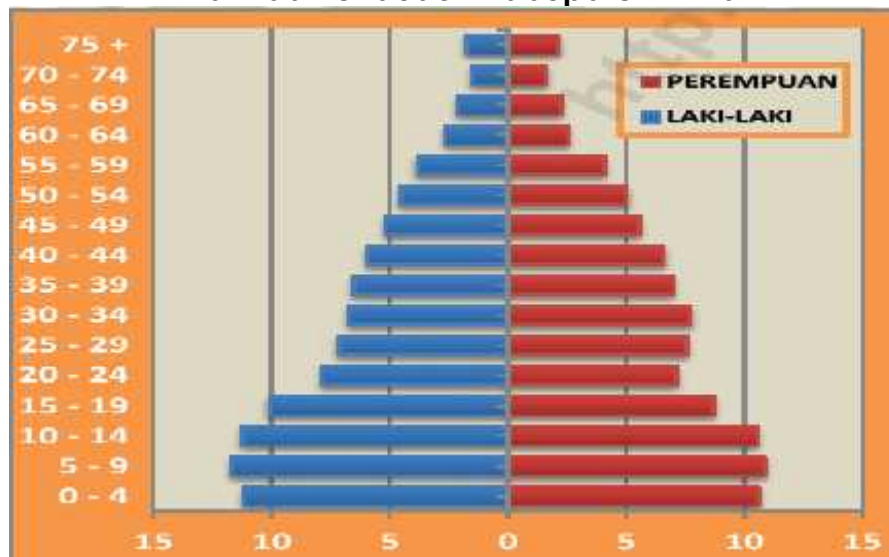
Kelompok Umur	Tahun 2011			Tahun 2016*		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	24.435	23.047	47.482	24.620	50.242	50.242
5 – 9	26.260	24.555	50.815	25.631	53.030	53.030
10 – 14	26.314	24.986	51.300	24.750	50.790	50.790
15 – 19	22.147	20.123	42.270	20.216	43.648	43.648
20 – 24	16.064	16.740	32.804	16.519	34.973	34.973
25 – 29	16.950	18.436	35.386	17.562	34.169	34.169
30 – 34	15.159	16.638	31.797	17.998	33.583	33.583
35 – 39	14.791	15.278	30.069	16.570	31.766	31.766
40 – 44	12.272	13.446	25.718	15.658	29.611	29.611
45 – 49	10.683	11.296	21.979	13.335	25.563	25.563
50 – 54	9.714	10.566	20.280	12.022	22.737	22.737
55 – 59	7.135	7.188	14.323	9.898	18.941	18.941
60 – 64	5.641	5.595	11.236	6.254	12.598	12.598
65 +	11.194	12.575	23.769	14.361	27.031	27.031
Total	218.759	220.469	439.228	233.288	235.394	468.682

Sumber: Bima Dalam Angka 2016

Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Grafik 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Bima



Sumber: BPS Kab. Bima, 2016

Grafik 1.2 memperlihatkan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Bima termasuk tipe ekspansif, ditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebih lebar dibandingkan dengan usia di atasnya dan bagian atas yang menunjukkan usia lansia cenderung mengecil sejalan dengan meningkatnya umur.

1.5.7. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bima mencapai 106 jiwa per kilometer persegi. Namun demikian penduduk Kabupaten Bima menyebar secara tidak merata pada 18 kecamatan wilayah administrasi Kabupaten Bima. Ketidak-merataan persebaran penduduk di Kabupaten Bima dapat diketahui dari jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah.

Tabel 1.5
Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Luas / Area (Km ²)	Penduduk		Kepadatan
			Jumlah	%	
1.	Monta	227,52	35.697	7,62	157
2.	Parado	261,29	9.282	1,98	36
3.	Bolo	66,93	47.175	10,07	705
4.	Madapangga	237,58	29.210	6,23	123



5.	Woha	105,57	46.856	10,00	444
6.	Belo	44,76	26.579	5,67	594
7.	Palibelo	71,58	26.453	5,64	370
8.	Wawo	132,29	17.364	3,70	131
9.	Langgudu	322,94	28.067	5,99	87
10.	Lambitu	65,40	5.433	1,16	83
11.	Sape	232,12	56.572	12,07	244
12.	Lambu	404,25	36.578	7,80	90
13.	Wera	465,32	29.943	6,39	64
14.	Ambalawi	180,65	19.391	4,14	107
15.	Donggo	123,83	17.888	3,82	144
16.	Soromandi	341,66	16.499	3,52	48
17.	Sanggar	477,89	12.624	2,69	26
18.	Tambora	627,82	7.071	1,51	11
Jumlah		4.389,40	468.682	100,00	3.465

Sumber: Bima Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 1.5 persebaran perkecamatan, Kecamatan Bolo, merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat yakni 705 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Tambora, dengan kondisi wilayah yang luas, dan dengan penduduk relatif sedikit, kepadatannya hanya 11 jiwa per kilometer persegi.

1.5.8. Pengelompokan Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja

Pengelompokan penduduk di Kabupaten Bima yang termasuk angkatan kerja (usia 15 tahun keatas) mencapai 195 337 jiwa, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 1.6

Tabel 1.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor dan jenis kelamin di kabupaten Bima

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	58.778	39.670	98.448
2	Pertambangan dan Penggalian	4.666	677	5 343
3	Industri Pengolahan	6.210	6 872	13 082
4	Listrik, Gas, dan Air	0	0	0
5	Bangunan	5 050	0	5 050



6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	8 839	21 500	30 339
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8 657	0	8 657
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	352	179	531
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	16 806	17 081	33 887
Jumlah		109 .358	85 .979	195 .337

Sumber : Bima Dalam Angka 2016

1.6. Sistematika Penyajian

Untuk menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Bima, laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat, latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintahan Kabupaten Bima, gambaran umum organisasi perangkat daerah dan gambaran umum daerah serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bab ini memuat, perencanaan strategis yang meliputi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bima, tujuan dan sasaran pembangunan serta cara mencapai tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat, kerangka pengukuran kinerja, capaian pengukuran kinerja, capaian kinerja sasaran strategis, evaluasi kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan tahun 2016.

BAB IV PENUTUP